

**KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP: TINJAUAN TEORITIS,
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, DAN TANTANGAN DI ERA DIGITAL
INDONESIA**

Fahriana, Habib Anwar Al-Anshari²

¹Pascasarjana UINSI Samarinda

² UINSI Samarinda

¹flamboyan.perjiwa@gmail.com, ² habibpalaran@gmail.com

ABSTRACT

Lifelong education is a strategic instrument for maintaining individual relevance amidst the rapid dynamics of technology, economics, and social shifts. However, in Indonesia, the implementation of this concept remains fragmented between lagging conventional non-formal pathways and digital skills enhancement programs that tend to be exclusionary. This study is crucial for identifying systemic barriers to lifelong education policy and formulating a more inclusive direction for integration. This research employed a qualitative literature review and comparative policy analysis, processing secondary data from the Central Bureau of Statistics, national surveys, and World Bank evaluation reports. The study's results indicate a policy bifurcation between Community Learning Centers (PKBM), which face structural financial and facility constraints, and the Pre-Employment Card Program, which is highly adaptive but limited to groups with adequate digital literacy. This gap fuels unequal access to sustainable learning, particularly for marginalized communities in rural areas.

Keywords: Lifelong Education, Andragogy, Pre-Employment Card, PKBM, Digital Literacy.

ABSTRAK

Pendidikan seumur hidup merupakan instrumen strategis untuk memelihara relevansi individu di tengah pesatnya dinamika teknologi, ekonomi, dan pergeseran sosial. Namun, di Indonesia, implementasi konsep ini masih terfragmentasi antara jalur nonformal konvensional yang tertinggal dan program peningkatan keterampilan digital yang cenderung eksklusif. Kajian ini sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan sistemik dalam kebijakan pendidikan sepanjang hayat serta merumuskan arah integrasi yang lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif dan analisis kebijakan komparatif dengan mengolah data sekunder dari Badan Pusat Statistik, survei nasional, serta laporan evaluasi World Bank. Hasil kajian menunjukkan adanya pembelahan kebijakan (policy bifurcation) antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menghadapi hambatan struktural finansial serta fasilitas, dan Program Kartu Prakerja yang sangat adaptif namun terbatas pada kelompok masyarakat yang telah memiliki literasi digital memadai. Kesenjangan ini memicu ketimpangan akses

pembelajaran berkelanjutan, terutama bagi masyarakat marjinal di daerah pedesaan.

Kata Kunci: Pendidikan Seumur Hidup, Andragogi, Kartu Prakerja, PKBM, Literasi Digital.

A. Pendahuluan

Pendidikan seumur hidup merupakan instrumen strategis untuk memelihara relevansi individu di tengah pesatnya dinamika teknologi, ekonomi, dan pergeseran sosial. Namun, di Indonesia, implementasi konsep ini masih terfragmentasi antara jalur nonformal konvensional yang tertinggal dan program peningkatan keterampilan digital yang cenderung eksklusiver. Kajian ini sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan sistemik dalam kebijakan pendidikan sepanjang hayat serta merumuskan arah integrasi yang lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif dan analisis kebijakan komparatif dengan mengolah data sekunder dari Badan Pusat Statistik, survei nasional, serta laporan evaluasi World Bank. Hasil kajian menunjukkan adanya pembelahan kebijakan (policy bifurcation) antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menghadapi hambatan struktural finansial serta fasilitas, dan Program

Kartu Prakerja yang sangat adaptif namun terbatas pada kelompok masyarakat yang telah memiliki literasi digital memadai. Kesenjangan ini memicu ketimpangan akses pembelajaran berkelanjutan, terutama bagi masyarakat marjinal di daerah pedesaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis kebijakan komparatif. Fokus kajian diarahkan pada evaluasi kritis terhadap dua model implementasi kebijakan pendidikan seumur hidup nonformal di Indonesia, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merepresentasikan model berbasis komunitas lokal, dan Program Kartu Prakerja yang merepresentasikan model *Individual Learning Account* (ILA) berbasis platform digital berskala nasional.

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder bereputasi. Sumber informasi

dokumen meliputi data statistik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 , data kepesertaan dan evaluasi dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO) tahun 2024 , laporan evaluasi dampak sosial-ekonomi dari World Bank , dokumen regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas , serta artikel jurnal ilmiah terkait andragogi dan literasi digital.

Proses penelitian dilaksanakan melalui empat tahap sistematis:

1. **Pengumpulan Dokumen:**
Menginventarisasi data statistik nasional dan teks kebijakan terkait PKBM dan Kartu Prakerja.
2. **Reduksi Data:** Menyaring data statistik kunci, persentase kepuasan, indeks literasi digital, serta temuan evaluasi dampak.
3. **Triangulasi Data:**
Memverifikasi keselarasan antara klaim teoritis andragogi dengan realitas statistik di lapangan guna menghindari bias subjektif.
4. **Analisis Tematis:**
Menganalisis data menggunakan kerangka kritis

neoliberalisme dan perbandingan kebijakan komparatif dengan model internasional.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) deskriptif kualitatif dan metode komparatif konstan guna merumuskan implikasi kebijakan secara komprehensif.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan empiris mengonfirmasi adanya ketimpangan sistemis dalam implementasi pendidikan seumur hidup di Indonesia. PKBM sebagai penyangga tradisional di tingkat komunitas lokal didera oleh keterbatasan sarana fisik dan manajerial, sehingga gagal menjadi jembatan keterampilan yang efektif bagi masyarakat kurang mampu. Di sisi lain, inovasi digital seperti Program Kartu Prakerja menunjukkan kinerja administrasi yang efisien dan jangkauan luas, namun efektivitasnya dibatasi oleh rendahnya indeks literasi digital nasional dan ketimpangan infrastruktur internet broadband di wilayah pedesaan. Analisis Diskursif: Posisi Kajian dalam Literatur GlobalApabila

dibandingkan dengan literatur global, temuan ini menunjukkan deviasi yang signifikan dari beberapa teori mapan: Kontras dengan Model AJ Cropley: Cropley mengusulkan agar pendidikan seumur hidup dijadikan sebagai garis panduan untuk mereformasi sekolah formal agar lebih fleksibel sejak dini. Namun di Indonesia, pendidikan sepanjang hayat diposisikan sebagai pemadam kebakaran remedial bagi kegagalan lulusan sekolah formal dasar yang tidak terserap pasar kerja. Kontras dengan Visi Cybergogy Abd Al-Karim Bakkar: Bakkar menekankan bahwa prasyarat utama pembelajaran digital adalah motivasi spiritual yang tinggi (uluww al-himmah) dan literasi kritis. Tanpa adanya prasyarat ini, ketersediaan ribuan kursus online gratis di internet tidak akan melahirkan pembelajar mandiri, melainkan memicu kejenuhan kognitif akibat ketidakmampuan menyeleksi informasi. Kontras dengan Deklarasi Tbilisi tentang PLH: Tbilisi menuntut pendekatan interdisipliner terpadu yang memandang lingkungan hidup

sebagai satu kesatuan totalitas. Namun, sistem pendidikan sepanjang hayat di Indonesia masih bersifat terfragmentasi, di mana pendidikan ketenagakerjaan dilepaskan sepenuhnya dari aspek kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial kewarganegaraan. Refleksi Filosofis: Keberadaan Sistem sebagai Tanda Apa? Dualitas sistemik ini menjadi penanda kuat terjadinya pergeseran ideologis dari pendidikan sepanjang hayat yang humanistik menuju komodifikasi neoliberal. Program Kartu Prakerja merupakan refleksi dari pergeseran tanggung jawab sosial negara kepada individu. Dengan memotong anggaran subsidi langsung untuk sekolah menengah kejuruan fisik dan mengalihkannya ke skema voucher digital individual, negara memosisikan dirinya sekadar sebagai fasilitator pasar komersial. Pembelajar dipaksa secara mandiri melakukan peningkatan keterampilan tanpa adanya jaminan keberkerjaan atau perlindungan ketenagakerjaan yang adekuat. Hal ini mengonfirmasi teori kritis bahwa

pendidikan seumur hidup di era digital tidak lagi berfungsi untuk menumbuhkan kepribadian utuh (Learning to Be) atau merawat kedewasaan politik warga negara, melainkan telah dikooptasi menjadi alat pertahanan ekonomi individualistik yang memicu kecemasan konstan di kalangan pekerja informal. Analisis Kausalitas: Mengapa Realitas Empiris Seperti Ini? Mengapa pembelahan kebijakan ini terjadi? Secara kausalitas, fenomena ini didorong oleh kebijakan desentralisasi yang tidak matang dan bias urban dalam perencanaan digitalisasi. Ketika urusan pendidikan nonformal diserahkan kepada pemerintah daerah, tidak ada mekanisme kontrol kualitas dan standar pembiayaan minimum dari pemerintah pusat. Akibatnya, alokasi anggaran PKBM di tingkat kabupaten/kota sangat tergantung pada kemampuan fiskal dan komitmen politik kepala daerah setempat, yang kerap menempatkan sektor nonformal pada prioritas terbawah. Di sisi lain, perumusan Program Kartu Prakerja dirancang menggunakan logika pelaku industri teknologi perkotaan

(techno-optimism), yang mengasumsikan bahwa semua warga negara Indonesia telah memiliki kepemilikan gawai, stabilitas kuota internet, serta kapasitas kognitif untuk memilih kursus secara mandiri. Kebijakan ini mengabaikan kesenjangan infrastruktur digital di pedesaan, sehingga melahirkan ketimpangan manfaat di mana kelompok masyarakat perkotaan yang sudah terdidik memperoleh porsi manfaat yang jauh lebih besar daripada masyarakat miskin pedesaan. Implikasi dan Langkah Strategis Masa Depan Jika dualitas kebijakan ini dibiarkan berlanjut tanpa intervensi taktis, Indonesia berisiko mengalami bencana demografi. Populasi angkatan kerja paruh baya dan lansia yang mencapai puluhan juta jiwa di sektor informal akan mengalami eksklusi ekonomi total karena tidak mampu mengejar ketertinggalan teknologi. Untuk memitigasi risiko tersebut, langkah konkret yang wajib diambil mencakup: Implementasi Model "Blended PKBM": Mengonvergensi PKBM fisik dengan ekosistem digital Kartu Prakerja. Pemerintah

daerah harus melengkapi PKBM di pedesaan dengan akses internet broadband, fasilitas laptop, dan tutor andragogi bersertifikat yang bertugas mendampingi masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan pelatihan online secara hybrid. Transisi ke Skema Co-payment: Mereformasi pendanaan Kartu Prakerja dengan mencontoh sistem Korea Selatan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pendidikan seumur hidup di Indonesia terjebak dalam pembelahan kebijakan yang tajam. Di satu sisi, PKBM sebagai institusi penyangga lokal mengalami keterbatasan fasilitas dan manajemen karena diabaikan oleh kebijakan desentralisasi anggaran. Di sisi lain, Program Kartu Prakerja mewakili lompatan digital yang efisien namun bias perkotaan dan berisiko mengeksklusi masyarakat miskin pedesaan akibat rendahnya literasi digital nasional 3,54/5.00 serta ketiadaan konektivitas internet di wilayah marjinal. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah nasional (9,07 tahun) mengindikasikan bahwa pendidikan seumur hidup di Indonesia masih diposisikan sebagai jaring

pengaman remedial dasar, bukan sarana pengembangan kepribadian yang humanistik dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, M., Ubaidillah, M. F., & Akbar, M. I. F. (2023). Relevansi Antara Konsep Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara dan Konsep Pendidikan Islam Seumur Hidup (Lifelong Education). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1).
- Fajriyah, A. N., Nimah, I., & Khoirunnisa, N. C. (t.t.). *Pendidikan Karakter di Era Digital: Tantangan dan Solusi*.
- Fitriah. (2021). LIFELONG LEARNING SEBAGAI RESPON ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *An-Nahdhah*, 14(2).
- Gunawan, I. (2024). Pendidikan Karakter: Tantangan dan Solusi di Era Digital. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura*.
- Hidayat, S., & Saripulloh, A. (2025). Pendidikan Lifelong Learning dalam Meningkatkan Kesiapan Tenaga Kerja di Indonesia Melalui Implementasi yang Efektif. *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 109–124.
<https://doi.org/10.52593/adb.02.2.04>

- Jannah, F. (2013). Pendidikan Seumur Hidup dan Implikasinya. *DINAMIKA ILMU*, 13(1).
<https://doi.org/10.21093/di.v13i1.19>
- Marfu'ah, Hj. (2022). Pendidikan Sepanjang Hayat dan Berbagai Implikasinya. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ASWAJA*, 7(2), 87–100.
<https://doi.org/10.56013/jpka.v7i2.1159>
- Nabila Khairani & Gusmaneli Gusmaneli. (2024). Implikasi Konsep Pendidikan Seumur Hidup. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 236–248.
<https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.346>
- Nata Hudin, M., Sabariani, R., Safitri, S., & Bachtiar Pamulaan, A. (2024). ARTI DAN TUJUAN PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP SERTA DASAR-DASAR PEMIKIRAN DAN IMPLIKASI KONSEPNYA. *ADIDAYA : Aplikasi Pendidikan dan Sosial Budaya*, 1(3), 69–74.
<https://doi.org/10.58466/adidaya.v1i3.1707>
- Nurisma, Y. (2022). Pendidikan Seumur Hidup. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 15(2), 269–275.
<https://doi.org/10.30957/cendekia.v15i2.722>
- Puspitasari, R. E., Mustofa, R. D., Astuningsih, F., Rofida, A., Wafa, S., & Muhtarom, T. (2024). Implementasi Konsep Belajar Sepanjang Hayat Melalui Kurikulum Daur Belajar Pada PKBM Sanggar Anak Alam Yogyakarta. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1).
- Ramadhani, S., & Suryani, N. (2024). Pendidikan Seumur Hidup Dan Implikasinya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *QOUBA : Jurnal Pendidikan*, 1(2).
- SUHARTONO. (2017). KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, 3(1).
- Yuhety, H., Miarso, Y., & Baslemah, A. (2008). INDIKATOR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT. *JIV- Jurnal Ilmiah Visi*, 3(2), 150–170.
<https://doi.org/10.21009/JIV.0302.6>
- Zuhdi, muammar. (2023). Urgensi pendidikan Seumur hidup. *AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, 5(1).